



Buku

Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2024

Asikin, Zainal, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2012

Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan Dalam Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000

Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 2017

Hanif Nurcholis, *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonom Daerah*, PT Grasindo, Jakarta, 2005

Hardiyansyah , *Kualitas Pelayanan Publik* (edisi revisi), Gava Media, Yogyakarta, 2018

Hasyimzoem, Yusnani, dkk, *Hukum Pemerintah Daerah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018

Huda, Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung, ctk. Pertama, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2009

Huda, Ni'matul. *Ilmu Negara*. Rajawali Pers, Jakarta

Irtanto, Daimul, dkk, *Delivery Otonomi Daerah Konflik Otonomi Daerah, Penataan Daerah Otonom, Kerja Sama Antar Daerah, Inovasi Pelayanan Publik Dan Kinerja Birokrasi Sektor Publik*, ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2023

J.B. Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Buku Panduan Mahasiswa, ctk. Pertama, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994

Lukman, dkk, *Penyusunan Standar Pelayanan Publik*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2021

Nurmayani, *Hukum Administrasi Negara*. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009

S. Chandra, *Sertifikat Kepemilikan Hunian dan Tanah Persyaratan Permohonan di Kantor Pertahanan*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2014

Sutedi, Adrian, *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Penerbit Sinar Grafindo Jakarta, 2014

Soimin, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara di Indonesia*. UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2010

Jurnal

Eben B.C., Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, *Lex Administratum*, Vol. V/No. 2, 2017

Fitri Meilany, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Lex Administratum*, Vol.I, No.1, 2013

Gerit Elisa Mou, Kewenangan Pemerintah Kabupaten atau Kota Terhadap Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, *Borneo Law Review*, Vol 2, No. 2, 2018

Mario Julyani, Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*. Volume 01 Nomor 01, 2019

Jumadi, Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum Unsulbar*; 2016

Kadar Pamuji, Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol 14 No. 3, 2014

Muhammad, “Analisis Kualitas Pelayanan Publik Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur” *Universitas Medan Area*; 2018

Rina Ekawati, Implementasi Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Wilayah Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara. *Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman*; 2012

Riska Anugerah Pratiwi, MA, “Efektivitas dan Penerbitan Sertifikat Tanah Pada Kantor Pertanahan Sewali Manda” *Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Kabupaten Administrasi Negara Makassar*; 2018

Siti Halilah, Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Volume 4, 1

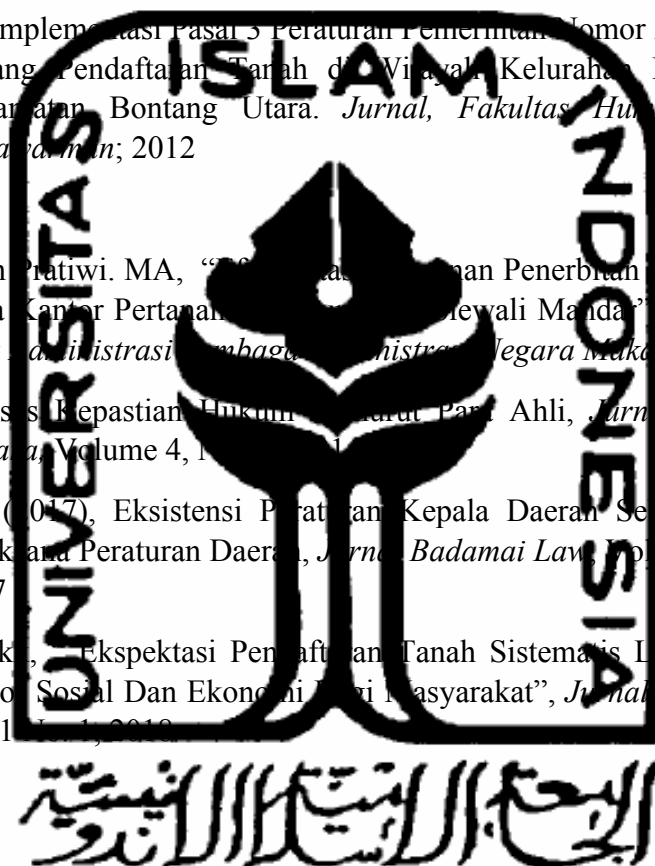
Sylvia Aryani (2017), Eksistensi Peraturan Kepala Daerah Sebagai Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah, *Jurnal Badamai Law*, Vol 02, Nomor 01, 2017

Wahyu Andi dkk, “Ekspektasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap terhadap Faktor Sosial Dan Ekonomi Masyarakat”, *Jurnal Tunas Agraria*, Vol 1 No 1, 2018

Data Internet

Ananda, “Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli” dalam https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastianhukum/?srsltid=AfmBOopHETukSUyRmtMtV_QDoMiVJgr3tqmlQeSWNlqwIY4c4k-FeJVg Akses terakhir pada 8 Februari 2025

“Awat Kehilangan Hak Tanah Anda di 2026! Begini Cara Mengubah Girik dan Letter C ke SHM” dalam <https://www.raywhite.co.id/news/172936-awat-kehilangan-hak-tanah-anda-di-2026-begini-cara-mengubah-girik-dan-letter-c-ke-s> Akses terakhir pada 8 Juli 2026



Benny Eko, “Optimalisasi Pajak Daerah dalam Mendukung Anggaran Pemerintah Pusat” dalam <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data-publikasi/berita-terbaru/3792-optimalisasi-pajak-daerah-dalam-mendukung-anggaran-pemerintah-pusat.html#:~:text=Dengan%20pendapatan%20pajak%20daerah%20yang,spesifik%20mereka%20sendiri%20secara%20mandiri.&text=Pajak%20daerah%20memiliki%20potensi%20besar%20untuk%20mendukung%20anggaran%20pusat%20dan%20pembangunan%20nasional>. Akses terakhir pada 16 Juni 2025

DPRD Kabupaten Sleman, “Masa Sidang Reses / Penjarangan Apirasi DPRD Kab. Sleman” dalam <https://dprd.slemankab.go.id/2019/03/29/masa-sidang-reses-penjarangan-apirasi-dprd-kab-sleman/>. Akses terakhir pada 23 Juni 2025

Jihan Aron, “Mulai 2026 Tanda Bukti Kepemilikan Tanah Yang Diakui Negara Hanya Satu”, terdapat dalam <https://radarjogja.jawapos.com/jawa-tengah/653849517/mulai-2026-tanda-bukti-kepemilikan-tanah-yang-diakui-negara-hanya-satu>. Akses terakhir pada 2 Desember 2024

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, Kamus, dalam <https://kbbi.web.id/formulasi>. Akses terakhir pada 11 Februari 2025

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, Kamus, dalam <https://kbbi.web.id/waris>. Akses terakhir pada 13 Maret 2025

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, Kamus, dalam <https://kbbi.web.id/wenang>. Akses terakhir pada 8 Februari 25

Kakilangit, “Masyarakat Tidak Buat Sertifikat Takut Kena Pajak PHTB”, dalam <https://babel.bpk.go.id/masyarakat-tidak-buat-sertifikat-takut-kena-pajak-bpkhtb/>. Akses terakhir pada 9 Desember 2024

“Kantor Hukum Mars Law : Tanda Bukti Kepemilikan Tanah Yang Diakui Mulai 2026”, dalam <https://www.detikline.com/2024/08/kantor-hukum-maslaw-tanda-bukti.html>. Akses terakhir pada 9 April 2025

Kementerian Agama Republik Indonesia dalam <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/42?from=15&to=53>. Akses terakhir pada 1 Mei 2025

Monitor Depok “Dokumen Tanah Jenis Ini Tak Berlaku Lagi di Tahun 2026, BPN Depok: Segera Urus SHM” terdapat dalam <https://www.monitordepok.co/dokumen-tanah-jenis-ini-tak-berlaku-lagi-di-tahun-2026-bpn-depok-segera-urus-shm>. Akses terakhir pada 2 Desember 2024

- Muslim B. “*Mengenal Pelayanan Publik*” dalam <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--mengenal-pelayanan-publik> Akses terakhir pada 18 April 2025
- Nur Umar. “*Apa itu TAP MPR? Ini Penjelasan Kedudukannya dalam Peraturan Perundang Undangan*”. dalam <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7568423/apa-itu-tap-mpr-ini-penjelasan-kedudukannya-dalam-peraturan-perundang-undangan> Akses terakhir pada 13 April 2025
- “*Otonomi Daerah*” dalam <https://paralegal.id/pengertian/otonomi-daerah/> Akses terakhir pada 19 Februari 2025
- Pajak, S. “*Mengetahui Perbedaan PBB P2 dan PBB P3*”. Sobatpajak.com. dalam <https://www.sobatpajak.com/article/64f6a06c908061a1adf70b8d/Sobat%20Belajar%3A%20Mengetahui%20Perbedaan%20PBB%20P2%20dan%20PBB%20P3%20> Akses terakhir pada 2 April 2025
- P. Galih. “*Eksistensi Peraturan Kepala Daerah Dalam Sistem Hukum Indonesia*”. Jaringan Delapan dan Informasi Hukum. dalam <https://jdih.babelprov.go.id/eksistensi-peraturan-kepala-daerah-dalam-sistem-hukum-indonesia> Akses terakhir pada 27 April 2025
- Pemerintah Kabupaten Banyumas. “*Teori Pelayanan Publik*” Banyumaskab.go.id. dalam <https://dindikcapil.banyumaskab.go.id/page/39218/teori-pelayanan-publik> Akses terakhir pada 3 Desember 24
- Pemerintah Kabupaten Banyumas, *Peraturan Bupati*, Banyumaskab.go.id. dalam <http://dpmptsp.banyumaskab.go.id/page/34947/peraturan-bupati#:~:text=Peraturan%20Bupati%20adalah%20peraturan%20perundang,dalam%20menyelenggarakan%20kewenangan%20pemerintah%20daerah> Akses terakhir pada 11 Februari 2025
- Peraturan Bupati Sleman, <https://peraturan.infoasm.id/kabupaten/peraturan-bupati-sleman-nomor-83-tahun-2024/> Akses terakhir pada 17 Agustus 2025
- Raihan Fadilah, “*Pengertian Sertifikat Tanah Beserta Fungsinya*”, dalam <https://www.antaranews.com/berita/4244671/pengertian-sertifikat-tanah-beserta-fungsinya> Akses terakhir pada 4 November 2024
- Rais rozali, “*Asas-Asas dan Teori Pembentukan Perundang-Undangan*” dalam <https://zalirais.wordpress.com/2013/09/12/asas-asas-dan-teori-pembentukan-perundang-undangan/> Akses terakhir pada 10 Desember 2024
- Tugas & Fungsi - Badan Keuangan dan Aset Daerah*. Badan Keuangan

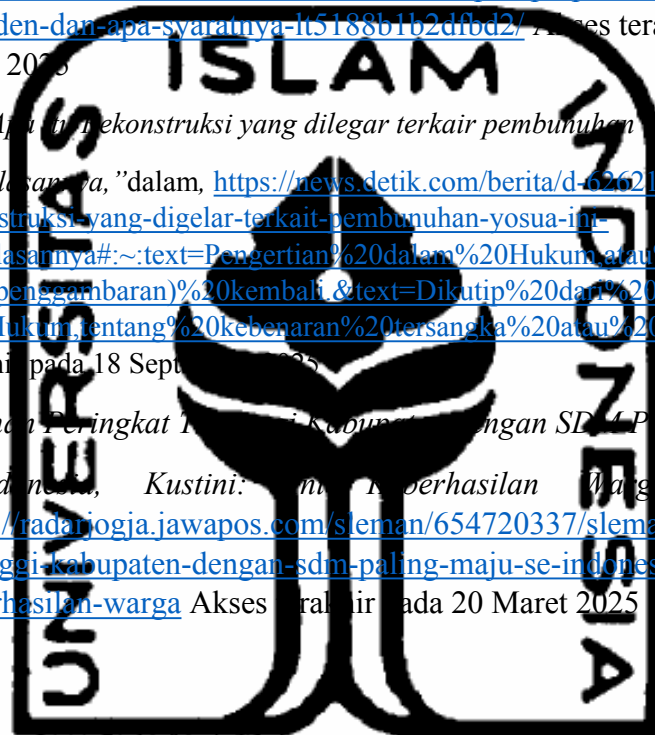
Dan Aset Daerah. dalam <https://bkad.slemankab.go.id/tugas-fungsi/>
Akses terakhir pada 11 Februari 2025

Tim Penulis Hukumku, “*Hierarki Peraturan Perundang Undangan di Indonesia dan Jenis jenisnya*” dalam <https://www.hukumku.id/post/hierarki-peraturan-di-indonesia#:~:text=Tak%20hanya%20itu%2C%20hierarki%20peraturan,dan%20kepastian%20dalam%20pelaksanaan%20aturan.> Akses terakhir pada 18 Februari 2025

Tri Jata , “*Kapan Perpu Dibuak oleh Presiden dan Apa Syaratnya*”. dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kapan-perpu-dibuat-oleh-presiden-dan-apa-syaratnya-1t5188b1b2dfbd2/> Akses terakhir pada 10 April 2025

Widhia Arum, “*Apa itu Rekonstruksi yang digelar terkait pembunuhan Yosua? Ini Penjelasan nya*,” dalam, [https://news.detik.com/berita/d-6262188/apa-itu-rekonstruksi-yang-digelar-terkait-pembunuhan-yosua-ini-penjelasan-nya#:~:text=Pengertian%20dalam%20Hukum,atau%20penyusunan%20\(penggambaran\)%20kembali.&text=Dikutip%20dari%20buku%20Kamus%20Hukum,tentang%20kebenaran%20tersangka%20atau%20saksi.](https://news.detik.com/berita/d-6262188/apa-itu-rekonstruksi-yang-digelar-terkait-pembunuhan-yosua-ini-penjelasan-nya#:~:text=Pengertian%20dalam%20Hukum,atau%20penyusunan%20(penggambaran)%20kembali.&text=Dikutip%20dari%20buku%20Kamus%20Hukum,tentang%20kebenaran%20tersangka%20atau%20saksi.) Akses terakhir pada 18 September 2025

Yogi Isti, “*Sleman Peringkat Tertinggi Kabupaten dengan SDMP Paling Maju se-Indonesia*,” Kustini: *Siapa yang Berhasilan Warga*, “ dalam <https://radarjogja.jawapos.com/sleman/654720337/sleman-peringkat-tertinggi-kabupaten-dengan-sdm-paling-maju-se-indonesia-kustini-ini-keberhasilan-warga> Akses terakhir pada 20 Maret 2025



Perundang Undangan

Undang Undang Dasar Tahun 1945

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang Undang Nomor 21 tahun 1997 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Undang Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 atas perubahan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah

Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan United Nations
Undang Convention Against Transnational Organized Crime
(Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Menentang Tindak Pidana
Transnasional Yang Terorganisasi).

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah

Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Hubungan Antara Pemerintah
Pusat Dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Ketentuan Umum Dan Tata
Cara Penungutan Pajak Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas
Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN RI Nomor 15 Tahun 2021 tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor
18/2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas
Tanah.



Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Daerah Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Bupati Sleman Nomor 86 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah

Peraturan Bupati Sleman Nomor 83 Tahun 2024 tentang Penghitungan, Pembayaran, Penelitian, Pengurangan, Pembetulan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Dan Pelaporan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

Wawancara

Wawancara dengan H.Sarmilih S.H sebagai Kepala Hukum Marsulawa Sabtu, 3 Agustus 2024.

Wawancara dengan Hendra R. sebagai selaku warga Masyarakat, 10 Juni 2025

Wawancara dengan Heru Purnama sebagai Kepala Subagian TU BPN Kabupaten Sleman, 11 Juni 2025

Wawancara dengan Ir. Dwianta Sudibya sebagai Kepala BKA II Sleman, 10 Juni 2025

Wawancara dengan Ir. Dwianta Sudibya sebagai Kepala BKA I Sleman, 10 Juni 2025

Wawancara dengan Mujati selaku warga Masyarakat, 12 Juni 2025

Wawancara dengan Farman selaku warga Masyarakat, 12 Juni 2025

Wawancara dengan Prangkat desa Jagayabaya Kelurahan Jogotirto Berbah Sleman, 7 Februari 2025

Wawancara dengan Siti Khodijah selaku warga Masyarakat 12 Juni 2025

Wawancara dengan Siti Khodijah selaku warga Masyarakat 12 Juni 2025

Wawancara dengan Supanggung selaku warga Masyarakat, 12, Juni 2025

Wawancara dengan Trianto selaku warga Masyarakat, 12 Juni 2025

Wawancara dengan Yudiantoro selaku warga Masyarakat, 12 Juni 2025

